



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GUSTI RAHMAT**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **193039**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **668.700.000**

1. Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN ,  
HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA  
BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 812 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI  
Rp. 8.700.000
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL  
SENDIRI Rp. 4.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL  
SENDIRI Rp. 1.000.000
6. Tanah Seluas 11.475 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL  
SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA  
BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **449.800.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2005,  
HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
100.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI  
Rp. 9.000.000

4. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.  
336.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 553.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 70.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 876.735.716

F. HARTA LAINNYA Rp. 200.000.000

Sub Total Rp. 2.818.235.716

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.818.235.716

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.